

**RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

(RENSTRA PD)

TAHUN 2025 – 2029



**KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN BARAT**

Jalan Pasar legi Nomor 46 Barat
Telepon 0351 - 869224

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kecamatan Barat sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 maka OPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2025- 2029, untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Renstra Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Barat Kabupaten Magetan juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, 15 Desember 2025

CAMAT BARAT



KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	28
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029.....	31
3.2. Sasaran Renstra Kabupaten PD Tahun 2025-2029.	33
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029, dan.....	34
3.4. Arah kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	35
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
4.1. Uraian Program.	37
4.2. Uraian Kegiatan.	49
4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.....	45
4.4. Uraian SubKegiatan dalam rangka pendukung program, prioritas pembangunan daerah.	58
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama 9IKU) Perangkat Daerah.	59
4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	64
BAB V PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045.
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024–2044.
 19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Barat Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- 1.3.1.** Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/ kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
- 1.3.2.** Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- 1.3.3.** Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/ program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat; Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Barat Kabupaten Magetan adalah :
Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dalam upaya

turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah;

1. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
2. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2025- 2029 inidisusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra OPD Kecamatan Barat 2025-2029
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah OPD Kecamatan Barat:
 - 2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah OPD Kecamatan Barat;
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Dearah;
 - 2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) OPD Kecamatan Barat
 - 2.1.4. Kelompok sasaran OPD Kecamatan Barat;
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung Jawab Perangkat Daerah.
- 2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah OPD Kecamatan Barat.
 - 2.2.2. Isu strategis OPD Kecamatan Barat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029;

- 3.2. Sasaran Renstra Kabupaten PD Tahun 2025-2029;
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output;
- 4.2. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada nomenklatur;
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target Dan pagu indikatif;
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Barat berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan

2.1.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah

Pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desadan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain

:

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;

- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub.Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;

- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan/penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksipemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- l) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- n) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- o) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- q) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- r) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- s) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- t) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- u) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- v) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- w) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- x) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- y) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- z) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- aa) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- bb) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam

negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c. Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam

- rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencanalainnya;
 - k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

i. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Barat ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

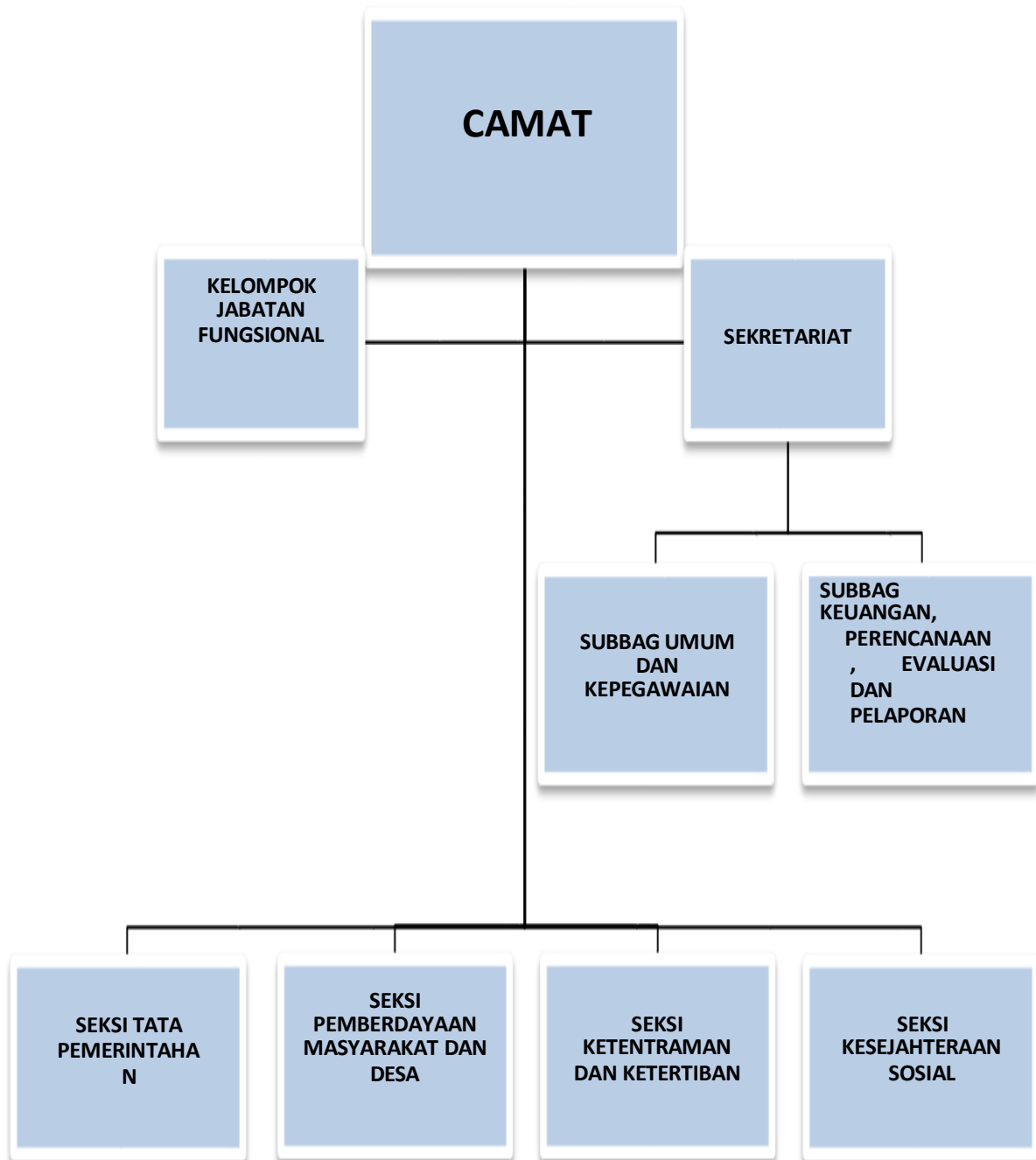
Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan PEP Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan:



KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan;
 - d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan;
 - e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD;
 - f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan;
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan;
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan

- tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan;
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum;
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja

- Seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
 - d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian;
 - e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
 - g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;
 - h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan;
 - i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan;
 - j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan;
 - k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

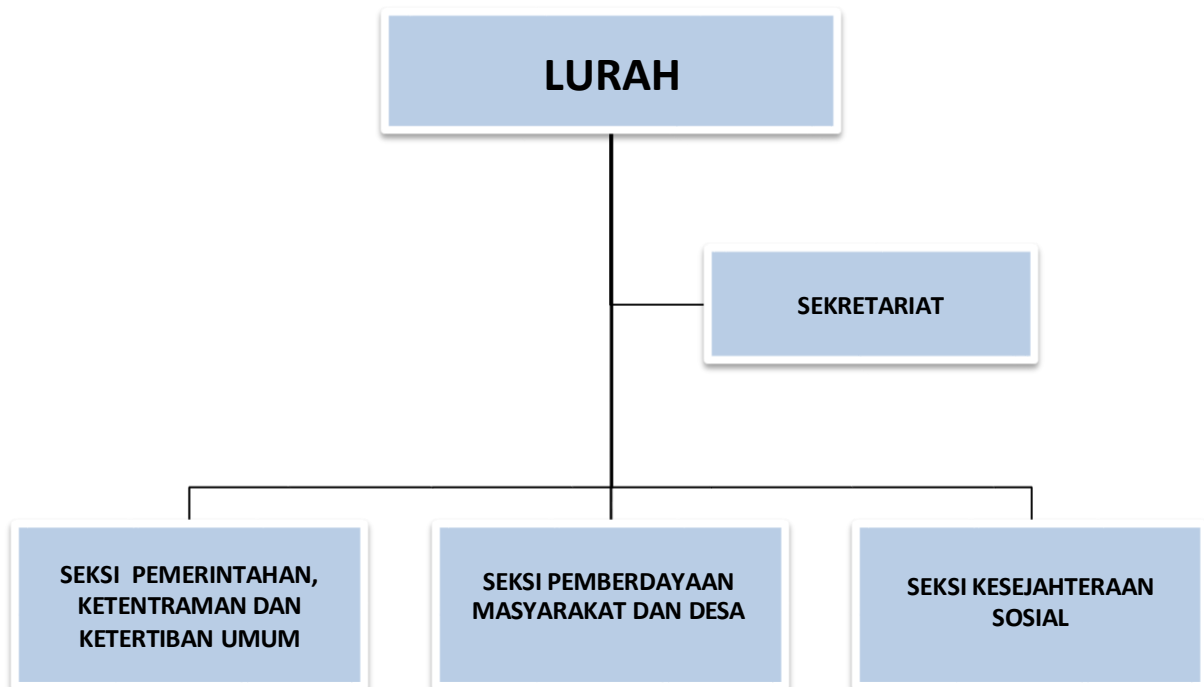
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f. melaksanakan program dan kegiatan

- peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan;
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga;
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.
Struktur Organisasi Kelurahan



2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Barat Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

2.1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-	-	-
2.	IV/d	-	-	-
3.	IV/c	-	-	-
4.	IV/b	1	-	1
5.	IV/a	1	1	2
6.	III/d	2	1	3
7.	III/c	2	2	4
8.	III/b	1		1
9.	III/a	3	2	5
10	II/d	-	2	2
11	II/c	-	1	1
12	II/b	-	-	0
13	II/a	-	-	-
14	I/d	-	-	-
15	I/c	-	-	-
16	I/b	-	-	-
17	I/a	-	-	-
	Jumlah	10	9	19

Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	VII	-	-	-
2.	VI	-	-	-
3.	V	5	1	6

4.	IV	-	-	-
5.	III	1	-	1
6.	II	-	-	-
7.	-	-	-	-
	Jumlah	6	1	7

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kec. Barat Kab. Magetan*

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1		1
2.	Sekretaris	IIIb	1		1
3.	Kepala Seksi	IVa	1	1	2
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb		1	1
5.	Lurah	IVa	2		2
6.	Kasi dan Sekretaris di Kelurahan	IVb	2	2	4
7.	Fungsional Umum	-	3	5	8
	Jumlah				19

Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan / Kelas	Jumlah (orang)	Laki-Laki	Perempuan	Keterangan
1.	VII	-	-	-	-
2.	VI	-	-	-	-
3.	V	6	5	1	PPPK
4.	IV	-	-	-	-
5.	III	1	1	-	PPPK
6.	II	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-
	Jumlah	7	6	1	-

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kec. Barat Kab Magetan*

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana S2	2	1	3
2.	Sarjana	4	3	7
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-	-
4.	SLTA	2	7	9
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	8	11	19

Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pasca Sarjana S2	-	-	-	-
2.	Sarjana	-	-	-	-
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-	-	-
4.	SLTA	5	1	6	PPPK
5.	SLTP	1	-	1	PPPK
6.	SD	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	1	7	

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kec. Barat Kab Magetan*

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat
Kepemimpinan

**Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat
Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Laki- Laki	Perem- puan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-	-	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1	-	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpi m Tk.IV	3	1	4
	Jumlah	4	1	5

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kec. Barat Kab Magetan*

Jumlah PNS Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	LAKI-LAKI	10
2.	PEREMPUAN	9
	Jumlah	19

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kec. Barat Kab Magetan*

Jumlah PPPK Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	LAKI-LAKI	6
2.	PEREMPUAN	1
	Jumlah	7

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kec. Barat Kab Magetan*

SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Barat Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Barat Kab
Magetan**

No	Nama Aset	Satuan
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1

2	Kendaraan roda 2 (dua)	6
3	Rak rak penyimpanan	2
4	Lemari Kaca	7
5	Papan pengumuman	1
6	LCD Proyektor	2
7	Lemari Kayu	7
8	Meja Rapat	6
9	Meja Tulis	3
10	Kursi Rapat/Plastik	100
11	Kursi Rapat kayu	17
12	Kursi Tamu	2
13	Kursi Kerja	12
14	Kipas Angin	6
15	Televisi	2
16	Amplifier	2
17	Megaphone TOA	1
18	Stabilisator	1
19	Mimbar Podium	1
20	Laptop	4
21	CPU	8
22	Printer	9
23	Finger Print	1
24	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2
25	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17
26	UPS	3
27	Camera Digital	1
28	Pesawat Telepon	1
29	Stationary water pump	1
30	Meja Komputer	5
31	Meja Pelayanan	1
32	Kursi Tunggu Panjang	2

Sumber : Pengurus Barang Kec. Barat Kab Magetan

2.1.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan adanya Renstra maka kami sajikan evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir periode Renstra 2020- 2024 sebagai berikut :

- Capaian SPM Standart Pelayanan Minimal di Kantor Kecamatan Barat dengan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Barat sebagaimana di terangkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Barat
Kabupaten Magetan

1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Barat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya IKU	Target Renstra Kecamatan Barat Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	19	23	24	25	25	26	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			V	76,00	76.50	77,00	77,50	78,00	78,50	76,22	77.61	77,80	77,09	78,61	1,02	2,06	1,08	1,09	1,06
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			V		61	65	70	80,54	61		64,6	70,00	80,40	80,68		4,06	1,00	1,04	1,06
3	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan			V					84,75	84,85				88,70						4,07
4	Nilai SAKIP Kecamatan Barat			V					80,58	80,68					81,20					2,02

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Barat diatas dapat disimpulkan bahwa ;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target kinerja dan realisasi dapat tercapai.
2. Dalam hal Pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Kecamatan Barat realisasi melebihi target yang di rumuskan, sehingga bisa berpredikat kinerja baik.
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan mulai tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih banyak kinerja yang masih belum maksimal. Adapun dari (skoring) Kecamatan Barat 88,70.

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Barat
 Kabupaten Magetan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi ParaNorman	164.929.500					162.033.455					9,7					0,14	0,14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.839.835.505	3.674.392.265	3.466.562.253	3.421.224.930		3.625.233.100	3.558.504.367	3.377.876.007	3.380.017.492		92,93	96,84	97,44	98,80	11,20	11,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.500.000					122.493.400					99,9					-11,8	-11,8
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000					10.000.000					100					0	0
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	107.560.500					107.500.000					99,9					-11,8	-11,8
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		8.500.150	7.125.150	3.369.150	6.125.150		8.435.000	6.949.750	3.224.000	5.904.650		99,23	97,53	99,50	99,92	0,77	0,92
5	Program Pemberdayaan Kelurahan	-					-					-					-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000		33.680.000	21.836.350	33.940.000	33.495.000		99,05	64,23	99,82	98,51	1,95	1,95
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		56.320.600	56.320.600	34.271.600	86.073.800		41.700.200	41.700.200	34.211.225	79.259.100		74,04	74,04	98,2	92,02	7,98	7,98
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		5.000.000	50.000.000	7.000.000	7.000.000		4.960.000	4.960.000	6.295.100	6.295.100		99,2	99,2	89,93	89,93	0,98	10,8
	KELURAHAN TEBON																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota		135.500.000	136.443.180	144.460.700	172.900.750		123.865.760	123.865.760	143.865.760	171.198.950		91,41	90,78	99,58	99,01	0,90	0,90

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1.068.088.111	914.701.261	875.437.850	863.107.350		961.856.720	861.856.720	861.856.720	853.734.050		90,05	94,22	98,44	98,91	11,08	11,08
	KELURAHAN MANGGE																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		299.447.850	283.235.656	286.631.150	315.611.150		292.088.660	253.498.800	285.380.194	313.474.612		97,54	99,93	99,56	99,32	0,44	10,72
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		827.605.350	843.498.800	875.050.000	860.000.000		818.777.650	831.629.275	868.703.300	846.335.000		98,56	98,59	99,05	98,41	2,59	16,14
	Jumlah Total Kecamatan Barat, kelurahan Tebon dan kelurahan Mangge	404.990.000	6.274.297.521	5.999.716.912	5.696.782.703	5.766.043.130	402.026.855	4.910.597.090	5.704.801.222	5.615.348.306	5.689.713.954	99,26	78,26	95,08	98,57	98,68	11,32	11,32

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran pemerintahan Kecamatan Barat pada pihak- pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di Wilayah Kecamatan Barat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.1.5. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam memberikan pelayanan public, Kecamatan Barat Kabupaten Magetan memiliki mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, dalam memberikan pelayanan khususnya di Pencetakan dokumen kependudukan, seperti :

- KTP, KARTU KELUARGA, KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) dan dokumen dokumen lainnya

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

Perangkat Daerah

Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tidak memiliki Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam pemberian layanan.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab

Perangkat Daerah

Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tidak memiliki Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab

Perangkat Daerah dalam pemberian layanan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan pelayanan perangkat daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Barat Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan

2.2.2. Isu Strategis

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber- sumber daya. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Barat dalam hal perencanaan pelayanan publik. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.2
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya kelembagaan, birokrasi, serta transparansi informasi dan komunikasi publik	Perkembangan Teknologi Informasi dalam Bio Data untuk Pembangunan berkelanjutan	Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi pelayanan publik
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/kelurahan	2. Belum optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan				Kurangnya kolaborasi antar sektor dan stakeholder	Optimalisasi kolaborasi dan koordinasi serta fasilitas terkait Pembangunan desa/kelurahan

BAB III

TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

MAGETAN NYAMAN, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan
3. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan

Pembangunan Wilayah Perdesaan

4. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Responsive, Adaptif dan Transparan
5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran
6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah
7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau

3.I. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Barat Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Magetan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan.*** Tujuan tersebut selaras dengan Visi RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, yaitu: ***“Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan”***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Barat, dalam hal ini Kecamatan Barat Kabupaten Magetan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan

konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Magetan dapat tercapai. Adapaun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perumusan, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Nspk Dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Kondisi Akhir	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah urusan kewilayahahan Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Barat		Indeks Kepuasan Masyarakat	78,50 Skor	79,00 Skor	79,50 Skor	80,00 Skor	80,50 Skor	81,00 Skor		IKU
		Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Barat	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	80,78 nilai	80,88 nilai	80,98 nilai	81,08 nilai	81,18 nilai	81,28 nilai		IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Barat	Nilai SAKIP	88,50 Skor	88,55 Skor	88,60 Skor	88,65 Skor	88,70 Skor	88,75 Skor		IKU

Keterangan :

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPD Kecamatan Barat telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Barat tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti meubelair, peralatan dan perlengkapan kantor.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Barat

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Pemberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Pematangan Keberlanjutan sistem dan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan berikutnya	Evaluasi akhir pelaksanaan Renstra agar tercapai dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan serta memastikan keberlanjutan transformasi digital pelayanan publik dan koordinasi fasilitasi kewilayahan

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Barat Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan Barat

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Barat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Barat

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat Daerah dapat dilihat di Tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Barat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan	Memfasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat di setiap lingkungan RT	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan Barat	
			Pemanfaatan Teknologi Informasi	
			Transparansi dan Pelibatan Publik	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading, dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, sasaran, Outcome dan Output.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Barat ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Barat adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata,

dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pembinaan Dan Pengawasan

Pemerintahan Desa Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten / kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah, khususnya kepolisian dan pemerintah daerah, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum serta menanggulangi berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketentraman warga.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan inisiatif pemerintah atau lembaga untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu mengelola potensi lokal secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tabel 4.1.
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah hasil cascading dari Tujuan, sasaran, Outcome dan Output.

NPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK : Melaksana kan Kewenanga n Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		
					Nilai SAKIP		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Barat			1. Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan kecamatan 2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran pada Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	

				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				<i>Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				<i>Terkelolanya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan Pengadministrasian BMD yang disusun</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Barat</i>	<i>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	

				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<i>Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Barat</i>	<i>Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Jasa Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Barat</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Barat</i>	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		

		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Barat			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah kecamatan Barat		<p>1. Nilai Indeks Pelayanan Publik</p> <p>2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi</p>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan dan perizinan dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat yang efektif di Kecamatan	1.jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					2. jumlah laporan kinerja lembaga pemberdayaan desa / kelurahan terfasilitasi		
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan Barat		<p>- Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan</p> <p>- Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang</p>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	<i>Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa</i>	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Barat		persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	
				Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat Kecamatan (Forkopimca)	<i>jumlah koordinasi kamtibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan Barat		1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan 2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta Pembangunan wilayah yang berkualitas	<i>1. persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase usulan musrenbang yang</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	

					<i>terfasilitasi</i>		
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Barat			Nilai SAKIP		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien di Kelurahan		Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	
				<i>Terkelolanya Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan Pengadministrasian BMD yang disusun</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kelurahan</i>	<i>Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	

					<i>Perangkat Daerah</i>		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Jasa Perkantoran pendukung Kinerja Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Perkantoran pendukung Kinerja Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Barat			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial		- Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

				Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	1. Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan yang aktif 2. Jumlah Laporan IKM Kelurahan Tinap 3. jumlah usulan musrenbangkel yang terfasilitasi 4. jumlah penanganan kasus trantibum di wilayah kelurahan 5. persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam program sosial	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Pokmas / Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pelayanan Publik di Kelurahan sesuai SOP	Jumlah laporan hasil evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur.

KECAMATAN BARAT

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KECAMATAN BARAT															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan terhadap Layanan Kesekretariata//Skor		80	3.130.778.910											
Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Barat	1. Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan//Skor	77	77,85		79,50	3.811.195.010	80	4.001.004.752	80,50	4.200.304.982	81	4.409.570.221	81,50	4.629.297.718	
	2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran//%	79	80,74		80,74		80,84		80,94		81,04		81,14		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah/dokumen	16	7	8.102.060	7 Dokumen, 5 Laporan	8.147.173	7 Dokumen, 5Laporan	8.554.521	7 Dokumen, 5 Laporan	8.982.247	7 Dokumen, 5 Laporan	9.431.359	7 Dokumen, 5 Laporan	9.902.926	
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah//dokumen	6	7	5.427.060	7 Dokumen	5.273.423	7 Dokumen	5.537.084	7 Dokumen	5.813.938	7 Dokumen	6.104.635	7 Dokumen	6.409.866	
Output : Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCAMES/KEGIATA N/SUBKEGIATAN/OU TPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Evaluasi kinerja perangkat daerah Output : Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah//laporan	8	5	2.675.000	5	2.873.750	5	3.017.437	5	3.168.309	5	3.326.724	5	3.493.060	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> <i>Output: Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah // dokumen</i>	44	12	2.682.044.871	12 Bulan, 24 Laporan	2.920.575.558	12 Bulan, 24 Lqaporan	3.066.604.336	12 Bulan, 24 Laporan	3.219.934.551	12 Bulan, 24 Laporan	3.380.931.278	12 Bulan, 24 Laporan	3.549.977.842	
	<i>Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah // %</i>	38			2,25	2.241.155.376,00	2,20	2.353.213.145,00	2,15	2.470.873.802,00	2,10	2.594.417.492,00	2	2.724.129.370,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output: Tersedianya dokumren Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN//orang/bulan	240	228	2.679.131.673	12 Bulan	3.296.513.798	12 Bulan	3.456.3340.544	12 Bulan	3.629.407.566	12 Bulan	3.811.127.937	12 Bulan	4.001.933.325	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LI NE 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD//laporan	36	24	2.913.198	24 Laporan	3.071.358	24 Laporan	3.224.926	24 Laporan	3.386.171	24 Laporan	3.555.479	24 Laporan	3.733.253	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output : Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Pengadministrasian BMD yang disusun//laporan	-			-	-	-	-	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD//laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD//laporan	-			-	-	-	-	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian				29	15.000.000	29	15,000,000	29	15,000,000	29	15.000,000	29	15,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Ouput: Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Barat</i>	<i>sesuai Prosedur/orang</i>														
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i> <i>Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/orang</i>				17	12.500.000	17	12,500,000	17	12,500,000	17	12,500,000	17	12,500,000	
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i> <i>Ouput: Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian//dokumen</i>				5	2.500.000	5	2,500,000	5	2,500,000	5	2,500,000	5	2,500,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Umum Perangkat Daerah Ouput: Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Umum Pendukung Kinerja Kecamatan Barat	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	12	7	115.466.022	7	108.374.377	7	113.793.094	7	119.482.746	7	125.456.882	7	132.091.880	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan//palet	4	1	2.345.175	1	2.454.450	1	2.577.172	1	2.706.030	1	2.841.331	1	2.983.397	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ouput: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan//paket	15	1	64.985.644	1	40.403.242	1	42.423.404	1	44.544.573	1	46.771.802	1	49.110.392	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan//paket	4	1	4.724.423	1	4.950.644	1	5.198.176	1	5.458.084	1	5.730.988	1	6.017.537	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ouput: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan//paket	12	1	6.830.975	1	10.230.649	1	10.742.181	1	11.279.290	1	11.843.254	1	12.435.417	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan//paket	12	1	8.339.805	1	6.915.392	1	7.251.161	1	7.624.219	1	8.005.430	1	8.767.851	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Ouput: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan//dokumen	12	2	3.240.000	2	3.420.000	2	3.591.000	2	3.770.550	2	3.959.077	2	4.157.036	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ouput: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD//laporan	12	2	25.000.000	2	40.000.000	2	42.000.000	2	44.100.000	2	46.305.000	2	48.620.250	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ouput: Tersedianya Sarana dan Prasarana Jasa Penunjang Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah//laporan	12	12	105.825.590	12	161.306.651	12	169.371.983	12	177.840.581	12	186.732.610	12	196.069.240	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCAMES/KEGIATA N/SUBKEGIATAN/OU TPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	RGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Ouput: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan//laporan	12	12	19.291.590	12	20.608.601	12	21.639.031	12	22.720.982	12	23.857.031	12	25.049.882	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan//laporan	7	3	15.141.000	3	15.898.050	3	16.692.952	3	17.527.599	3	18.403.979	3	19.324.178	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan//laporan	12	3	71.393.000	3	124.800.000	3	131.040.000	3	137.592.000	3	144.471.600	3	151.695.180	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> <i>Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Perkantoran pendukung Kinerja Kelurahan</i>	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah//bulan	1	1	219.340.367	1	218.978.261	1	229.927.174	1	241.423.533	1	253.494.710	1	266.169.445	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	7	7	41.770.720	7	46.959.256	7	49.307.219	7	51.772.580	7	54.361.209	7	57.079.269	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya//unit															
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		1	1	177.569.647	1	172.019.005	1	180.619.955	1	189.650.953	1	199.133.501	1	209.090.176		
Ouput: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi//unit															
Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya//unit															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMNERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan//%	100%	100%	8.958.603	100%	7.855.478	100%	8.248.252	100%	8.660.664	100%	9.093.697	100%	9.548.382		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan	.1. Nilai indeks pelayanan public//indeks 2. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif dan telah ditetapkan//persen	2,0 88,70	2,2 100		2,4 100	7.855.478	2,6 100	8.248.252	2,8 100	8.660.664	3,0 100	9.093.697	3,2 100	9.548.382	
<i>Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> <i>Outcome: Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan dan perizinan dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat yang efektif di Kecamatan</i>	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan//kegiatan	7	12	8.958.603											
	1.Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan Adminduk, Pajak PBB dan perijinan yang dilaksanakan secara efektif//kegiatan .2. jumlah laporan kinerja lembaga pemberdayaan desa / kelurahan terfasilitasi//laporan				12	7.855.478	12	8.248.252	12	8.660.664	12	9.093.697	12	9.548.382	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Outcome: Meningkatnya	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan//dokumen	7	12	8.958.603	1	7.855.478	1	8.248.252	1	8.660.664	1	9.093.697	1	9.548.382	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan (%)//persen	100	12	35.700.000												
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosialn (%)//persen	100	100	35.700.000	100	37.485.000	100	39.359.250	100	41.327.213	100	43.393.573	100	40.760.785		
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa//kegiatan</i>	7	12	35.700.000												
<i>Output: Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif</i>	<i>Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana //kegiatan</i>	100	100	35.700.000	100	37.485.000	100	39.359.250	100	41.327.213	100	43.393.573	100	40.760.785		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCAMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7	12	35.700.000	100	37.485.000	100	39.359.250	100	41.327.213	100	43.393.573	100	40.760.785	
Output: Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan//laporan														
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum//Persen	99,98	100												
Outcome : Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan//Persen	100	100		100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625	100	127.628.156	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum//kegiatan	12	12												
Output : Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat Kecamatan (Forkopinca)	Jumlah Koordinasi Kamtibmas dan Penegakan Perda yang dilaksanakan secara efektif//kegiatan	100	100		100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625	100	127.628.156	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		15	100		100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625	100	127.628.156	
Output: Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan//laporan														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80//%	80	80												
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif	1. . Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan. //%	80	80		81	8.400.000	83	8.820.000	86	9.261.000	89	9.724.050	92	10.210.252	
	2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan//%	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Output: Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta Pembagunan wilayah yang berkualitas	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa//kegiatan	5	80	11.500.000	80	8.400.000	80	8.820.000	80	9.261.000	80	9.724.050	80	10.210.252	
	1. persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan //% 2. Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi//%		100	11.500.000	100	8.400.000	100	8.820.000	100	9.261.000	100	9.724.050	100	10.210.252	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Output: Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa//dokumen		80	11.500.000	80	8.400.000	80	8.820.000	80	9.261.000	80	9.724.050	80	10.210.252	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATA N/SUBKEGIATAN/OU TPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KELURAHAN TEBON															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota outcome: Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Kepuasan ASN Kelurahan terhadap Layanan Keseekretariatan //Nilai	80	80												
yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kelurahan Tebon	Indeks Kepuasan Layanan keseekretariatan//Skor	77	77,85		81	188.967.250	82	198.415.611	83	208.336.391	84	218.753.209	85	229.501.867	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Ouput: Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Pengadministrasian BMD yang disusun//laporan	-0	0	0	-	-	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Ouput: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD//laporan	-			-	-	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Umum Pendukung Kinerja Kelurahan	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah//bulan	7	7	70.664.351	7	55.567.250	7	58.345.611	7	61.262.891	7	64.326.034	7	67.542.334	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan//paket	3	1	3.500.000	1	3.858.750	1	4.051.687	1	4.254.271	1	4.466.984	1	4.600.333	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan//paket	15	1	34.144.351	1	17.000.000	1	14.850.000	1	14.742.500	1	15.679.625	1	17.663.606	
Penyediaan Peralatan Rumah Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan//paket	3	1	6.000.000	1	3.329.750	1	3.496.237	1	3.671.049	1	3.854.601	1	4.047.331	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan//paket	24	1	12.000.000	1	13.000.000	1	13.650.000	1	14.332.500	1	15.049.125	1	51.801.581	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan//paket	12	1	3.500.000	1	3.858.750	1	4.051.687	1	4.254.271	1	4.466.984	1	4.690.333	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	ASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan//dokumen	12	2	2.520.000	2	2.520.000	2	2.646.000	2	2.778.300	2	2.917.215	2	3.063.075	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD//laporan	36	2	9.000.000	2	12.000.000	2	12.600.000	2	13.230.000	2	13.891.500	2	14.586.075	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Jasa Penunjang Perkantoran pendukung Kinerja Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah//laporan	12	12	110.289.000	12	125.200.000	12	131.460.000	12	138.033.000	12	144.934.650	12	151.992.382	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output; Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan//laporan	12	2	6.000.000	2	4.000.000	2	4.200.000	2	4.410.000	2	4.630.500	2	4.862.025	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan//laporan	12	3	4.000.000	3	4.200.000	3	4.410.000	3	4.630.500	3	4.862.025	3	4.9126.126	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan//laporan	12	3	100.289.000	3	117.000.000	3	122.850.000	3	128.992.500	3	135.442.125	3	142.214.231	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Barat	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah//bulan	12	2	12.200.000	2	8.200.000	2	8.610.000	2	9.040.500	2	9.492.525	2	9.967.151	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya//unit	3	2	200.000	2	200.000	2	210.000	2	220.500	2	231.525	2	243.101	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Ouput: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya//unit	1	2	12.000.000	2	8.000.000	2	8.400.000	2	8.820.000	2	9.261.000	2	9.724.050	
Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan//%	100	100												
	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan//nilai	100	100		100	833.032.750	100	874.684.387	100	918.418.606	100	964.339.536	100	1.012.556.512	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat//Kegiatan	15	100		100	833.032.750	100	874.684.387	100	918.418.606	100	964.339.536	100	1.012.556.512	
Output: Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan	1.Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan yang aktif//lembaga				8		8		8		8		8		
					4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCAMES/KEGIATA N/SUBKEGIATAN/OU TPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
pembangunan partisipatif	2. Jumlah Laporan IKM//Nilai		7	540.850.000	7	458.032.750	7	480.934.387	7	504.581.106	7	530.230.161	7	556.741.669	
	3. jumlah usulan musrenbangkel yang terfasilitasi//dokum en				1		1		1		1		1		
	4. jumlah penanganan kasus trantibum di wilayah kelurahan//kasus 5.persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam program sosial//%				80		85		90		95		100		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan//Pokmas/Ormas	9	4	406.435.648	4	375.000.000	4	393.750.000	4	413.437.500	4	434.109.375	4	455.814.844	
Output: Terlaksananya Pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi Aktif masyarakat															
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun//unit	3	7	540.850.000	7	458.032.750	7	480.934.387	7	504.581.106	7	530.230.161	7	556.741.669	
Opuput: Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat															

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATA N/SUBKEGIATAN/OU TPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KELURAHAN MANGGE															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota outcome: Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Kepuasan ASN Kelurahan terhadap Layanan Keseekretariatan //Nilai	100	100												
yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kelurahan M a n g g e	Indeks Kepuasan Layanan keseekretariatan//Skor	77	77,85		81	189.845.750	82	199.338.038	83	209.304.939	84	219.770.176	85	230.758.680	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Ouput: Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Pengadministrasian BMD yang disusun//laporan	-0	0	0	-	-	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Ouput: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD//laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD//laporan	-			-	-	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Umum Pendukung Kinerja Kelurahan	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah//bulan	12	7	98.491.660	7	93.636.750	7	98.318.588	7	102.234.517	7	507.346.241	7	112.713.552	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan//paket	3	1	3.860.640	1	3.861.030	1	4.054.082	1	4.256.786	1	4.469.625	1	4.693.106	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan//paket	15	1	44.148.550	1	44.562.550	1	43.790.677	1	46.130.211	1	48.586.721	1	51.166.057	
Penyediaan Peralatan Rumah Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan//paket	3	1	3.637.515	1	3.637.515	1	3.819.391	1	4.010.360	1	4.210.878	1	4.421.422	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan//paket	12	1	22.844.955	1	17.575.655	1	18.454.438	1	18.377.160	1	19.296.108	1	20.260.819	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan//paket	12	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.675.000	1	3.858.750	1	4.051.687	1	4.254.271	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan//dokumen	12	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.675.000	2	3.858.750	2	4.051.687	2	4.254.271	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD//laporan	12	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.850.000	2	18.742.500	2	19.679.625	2	20.663.606	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> <i>Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Jasa Penunjang Perkantoran pendukung Kinerja Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah//laporan</i>	12	4	136.440.000	4	84.284.000	4	88.498.200	4	92.923.110	4	97.569.265	4	102.447.728	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output; Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan//laporan	12	2	8.584.000	2	8.584.000	2	9.013.200	2	9.463.860	2	9.937.053	2	10.433.906	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan//laporan	12	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.200.000	3	4.410.000	3	4.630.500	3	4.862.024	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan//laporan	12	3	123.858.000	3	71.700.000	3	75.285.000	3	79.049.250	3	83.001.712	3	87.151.798	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Barat	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah//bulan	12	2	11.925.000	2	11.925.000	2	12.521.250	2	13.147.312	2	13.804.677	2	14.494.910	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya//unit	3	2	300.000	2	300.000	2	315.000	2	330.750	2	347.287	2	364.651	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Ouput: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya/unit	1	2	11.625.000	2	11.625.000	2	12.206.250	2	12.816.562	2	13.457.390	2	14.130.259	
Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di Kelurahan Mangge	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan/%	100	100												
	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan/nilai	100	100		100	912.154.250	100	957.761.962	100	1.005.649.059	100	1.035.932.561	100	1.108.729.187	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat/Kegiatan	9	4												
Output: Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan	1. Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan yang aktif/lembaga				4	912.154.250	4	957.761.962	4	1.005.649.059	4	1.035.932.561	4	1.108.729.187	
					1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>pembangunan partisipatif</i>	2. Jumlah Laporan IKM//Nilai				4	912.154.250	4	957.761.962	4	1.005.649.059	4	1.035.932.561	4	1.108.729.187	
	3. jumlah usulan musrenbangkel yang terfasilitasi//dokumen				1		1		1		1		1		
	4. jumlah penanganan kasus trantibum di wilayah kelurahan//kasus				80		85		90		95		100		
	5. persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam program sosial//%														
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan//Pokmas/Ormas	9	4	433.010.0500	4	433.010.050	4	454.660.552	4	477.393.579	4	501.263.258	4	526.326.421	
Output: Terlaksananya Pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi Aktif masyarakat															
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun//unit	3	4	460.464.950	4	479.144.200	4	503.101.410	4	528.256.480	4	554.669.304	4	582.432.769	
Output: Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat															

Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun

4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas kinerja Kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan desa	mendukung tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sasaran mengurangi ketimpangan antar wilayah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama IKU Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kecamatan Barat
2025-2029

NAMA INSTANSI : KECAMATAN BARAT

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	IKU
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	80,78	80,88	80,98	81,08	81,18	81,28	IKU
3	Nilai SAKIP	Skor	88,50	88,55	88,60	88,65	88,70	88,75	IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BARAT TAHUN 2025-2030

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama IKU Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Barat
2025-2029

NAMA INSTANSI : KECAMATAN BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Barat	<p>Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$</p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Penilaian SKM Kecamatan oleh Bagian Organisasi Setdakab Magetan	Kecamatan Barat
2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Barat	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Barat	<p>Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Magetan	Kecamatan Barat

			<p>6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan</p> <p>7. Pelaksanaan tugas lainnya</p>		
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Kecamatan Barat	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 2. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi 	Inspektorat Kab Magetan	Kecamatan Barat

			<p>dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 5. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 		
--	--	--	--	--	--

4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari 2025 hingga tahun 2029. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci IKK Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kecamatan Barat
2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NIHIL							

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Barat Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Barat Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Barat Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029 sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 15 Desember 2025

CAMAT BARAT

